



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
ꦧꦏꦺꦱꦠꦸꦁꦧꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦧꦔꦱꦏꦺꦴꦧꦠꦶꦏꦶꦠꦶꦏ

JL. Sultan Agung No. 133 Yogyakarta Kode Pos : 55151 Telp. (0274) 5013885  
EMAIL : [kesbangpol@jogjakota.go.id](mailto:kesbangpol@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

=====

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR: 188.4/09/BAKESBANGPOL/I/2022

**TENTANG**

PENETAPAN RENCANA KERJA TIM REFORMASI BIROKRASI PADA BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung implementasi program, kegiatan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu menetapkan Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Yogyakarta;

6. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 502 Tahun 2017 tentang Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 di Pemerintah Kota Yogyakarta;
7. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
8. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pembentukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA TIM REFORMASI BIROKRASI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022
- PERTAMA : Membentuk Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2022 dengan susunan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta ini dibebankan kepada Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 3 Januari 2022

Kepala Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik



**Budi Santosa, S.STP., M.Si.**  
NIP. 197209141993031004

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR :188.4/09/BAKESBANGPOL/I/2022

TANGGAL :3 Januari 2022

**RENCANA KERJA TIM REFORMASI BIROKRASI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022**

Area Perubahan	Rencana Kerja	Hasil yang Diharapkan	2022			
			Tahapan/TW			
			I	II	III	IV
1. Manajemen Perubahan	a. Pembentukan Tim Manajemen	1. Penetapan SK Tim Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, meliputi susunan personalia dan uraian tugas 2. Dukungan pegawai terhadap program/kegiatan perubahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Keberhasilan pelaksanaan manajemen perubahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4. Perbaikan berkelanjutan terhadap Tim Reformasi Birokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	√			
	b. Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi	1. Data dukungan dan penolakan pemangku kepentingan terhadap manajemen perubahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Pedoman manajemen perubahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan "SATRIYA" di Pemerintah Kota Yogyakarta	√			

	c. Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi	<p>1. Penyelenggaraan bimbingan teknis manajemen perubahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>2. Mindset, culture dan komitmen terhadap manajemen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>3. Sistem yang mendukung manajemen perubahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>4. Internalisasi nilai-nilai "SATRIYA" pada seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p>	√	√		
	d. Evaluasi Penerapan Kebijakan	<p>1. Kesiapan administrasi, sarpras, materi dan SDM pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>2. Kebermanfaatan agen perubahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p>	√	√	√	√
	e. Pengukuran Dampak Perubahan	Data capaian tentang dampak perubahan dan laporan progres RB pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			√	
	f. Monitoring dan Evaluasi Dampak Perubahan	<p>1. Sikronisasi kegiatan budaya pemerintahan dengan rencana aksi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>2. Rekomendasi perbaikan / tindak lanjut terhadap hambatan implementasi manajemen perubahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p>				√
2. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	a. Penyusunan Rencana Strategis/Rencana Kerja	Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	√			
	b. Penyusunan Indikator Kinerja Utama	Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	√			
	c. Penyusunan Perjanjian Kinerja	Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	√			

	d. Penyusunan LKIP	Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				√
3. Penataan dan Penguata	a. Restrukturisasi Perangkat Daerah	1. Perubahan Peraturan Walikota tentang tupoksi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Data peningkatan kinerja/ kapasitas kelembagaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Efektivitas, efisiensi dan right sizing pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	√	√	√	√
	b. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Organisasi	Rekomendasi perbaikan kinerja organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		√		√
4. Penataan dan Manajemen Sumber Daya Aparatur	a. Penataan Pegawai Sesuai Analisa Jabatan dan analisa Beban Kerja	1. Anjab dan ABK pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Buku Pedoman anjab dan ABK pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Regulasi pelaksanaan anjab dan beban kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4. Kepwal hasil anjab pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5. Buku standar waktu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6. Dokumen resiko jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7. Informasi jabatan struktural dan fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				√
	b. Pengembangan Pola Karier	Dokumen kebijakan pola karier pegawai sehingga ada kejelasan arah dan objektivitas pengembangan karier pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	√	√	√	√

	c. Pelaksanaa Evaluasi Jabatan	1. Dokumen grade jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Dokumen validasi dan hasil evaluasi jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Pemberian tunjangan kinerja pegawai sesuai nilai dan kelas jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	√	√	√	√
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	a. Implementasi Standar Pelayanan	Kesiapan administrasi, sarpras, materi, SDM pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	√	√	√	√
	b. Penerapan dan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	1. Kesiapan administrasi, sarpras, materi dan SDM pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Terintegrasinya SPM dalam dokumen perencanaan pencapaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Laporan pencapaian SPM	√	√	√	√
	c. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1. Kesiapan administrasi, sarpras, materi dan SDM pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. SPP disusun sesuai kebutuhan masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	√	√	√	√
	d. Pengelolaan Layanan Pengaduan dan SKM	Kesiapan administrasi, sarpras, materi, SDM pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	√	√	√	√
	e. Standarisasi Sarana Prasarana Pelayanan Publik	Kesiapan administrasi, sarpras, materi, SDM pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	√	√	√	√
	f. Monitoring dan Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik	Rekomendasi perbaikan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			√	
6. Penataan Tatatlaksana	a. Penyusunan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	Tersusunnya SOP dan proses bisnis sesuai tupoksi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	√	√	√	√

	b. Pengembangan dan Implementasi E-Government	Laporan tentang pelaksanaan E-Government pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				√
	c. Monitoring dan Evaluasi Ketatalaksanaan	1. Laporan Monev Ketatalaksanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Rekomendasi perbaikan penataan ketatalaksanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				√



Kepala Badan  
Kesatuan Bangsa dan Politik

**Budi Santosa, S.STP., M.Si.**  
NIP. 197209141993031004